

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuadi, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary 9th edition*, St. Paul, West
- Gorton, Gary B., dan Souleles, Nicholas S., 2007, *The Risks of Financial Institutions : Special Purpose Vehicles and Securitization*, University of Chicago Press, Chicago
- Hadjon, Philipus M., 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hadjon, Philipus M, dan Djamiati, Tatiek, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hartono, Sri Redjeki, et. al, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia, Malang
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian ; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial 4th ed*, Kencana, Jakarta
- Kemenkeu, DJPPR Kemenkeu, 2020, *Panduan Analis Kelayakan Ekonomi*, Kemenkeu, Jakarta
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyana, Asep N, 2018, *Business Judgment Rule, Praktif Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

- Muryanto, Yudyo Taruno, 2017, *Tata Kelola BUMD, Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang
- PUPR, Direktorat Bina Ivestasi Infrastruktur Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR, 2017, *Pedoman Penjaminan Infrastruktur dalam Pelaksanaan KPBU Bidang PUPR*, Jakarta, KemenPUPR
- PUPR, Pusdiklat SDA dan Konstruksi BPSDM, 2017, *Modul Sumber dan Pola Pembiayaan Infrastuktur*, Kementerian PUPR, Jakarta
- PUPR, Pusdiklat SDA dan Kontruksi BPSDM, 2017, *Modul 4: Sumber Dan Pola Pembiayaan Infrastruktur*, KemenPUPR, Bandung
- PUPR, BPSDM Kementerian PUPR, 2019, *PDAM Sehat dan Mandiri Melalui Kerjasama Investasi*, Kementerian PUPR, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Said, M. Natzir, 1985, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Simamora, Y. Sogar, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta
- Syahrum, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau

ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL

- Abrianto, Bagus Oktavian, *et.al*, 2019, *Model on legal transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private local entities towards climate investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 5 No. 2

- Ainiyyah, Gadis Raynita, 2022, *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda*, Notary Law Journal Vol 1 No. 2
- Chowdhury, Abu Naser dan Chen, Po-Han, 2010, *Special Purpose Vehicle (SPV) of Public Private Partnership Projects in Asia and Mediterranean Middle East: Trends and Techniques*, International Journal of Institutions and Economies, Vol. 2, No. 1
- Hidayat, Maulana Hasanudin, 2019, *Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan*, National Journal of Law, Vol. 1, No. 1
- Indayani, Isna P. (2013), “Analisis Kelayakan Tarif Air Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Data Tahun 2009 Sampai Dengan 2012 Study Kasus di PDAM Tirta Dharma Kabupaten Sleman”. Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.2
- Istichori, I., Wiguna, I. P. A., & Masduqi, A. 2018, “Analisis Penentuan Tarif Air Minum Pdam Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery”. Journal of Civil Engineering, Vol. 33 No.1
- Junita, Audia, 2020, *Menakar Kesiapan Pembangunan Manusia Indonesia Menuju Negara Maju*, Prosiding Webinar Fakultas Ekonomi Unimed “Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19”
- Kuahaty, Sarah S, 2011, *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3
- Mesakh, Jakobis Johanis, et.al, 2015, *Kajian Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Untuk Masyarakat Di Kawasan Semi-Arid Indonesia*, Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol 22 No. 3
- Osborne, Deborah, 2007, *Effect of conditions precedent on building contracts*, Journal of Building Appraisal, Vol.2 No.3

- Porta, Rafael La, etc, 1999, Investor Protection and Corporate Governance, Jurnal of Financial Economics, Vol. 58, No 1-2
- Prasetyo, Kukuh Fadli, 2012, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3
- Quiggin, John, 2006, *Public Private Partnership; Options for Improved Risk Allocation*, UNSW Law Journal, Vol. 3
- Rachadian, Febri Muhammad, 2013, Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Mesin Frais Baru Pada CV. XYZ, J@TI Undip, Vol VIII, No. 1
- Suhendra, Maman, 2017, *Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership di Indonesia)*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.1
- Sutantra, Sutantra, Y., Mintardjo, A., & Nugraha, P., 2016, Studi Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Jalan Bebas Hambatan Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, Vol. 5 No. 2
- Taupiqqurrahman, 2021, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terkait Sarana Air Minum dalam mendukung Sustainable Development Goals*, Simbur Cahaya, Vol 22 Nomor 1
- Yuniarti, Junanita, Fifi, 2017, Prinsip Proporsionalitas Dan Governance Terhadap Alokasi dan Transfer Risiko Skema Kerjasama Public-Private Partnership (PPP), Yuridika, Vol. 32 No. 3

HASIL PENELITIAN/ TUGAS AKHIR

- Pangestu, Ronggo Adji, 2022, *Efektivitas Pembangunan dan Strategi Pengembangan Proyek KPBU: Studi Kasus pada Proyek Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN
- Rangga, Wiesma Mara, 2020, *Risiko Hukum terhadap Investasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang di diprakarsai oleh Badan Usaha*

(Unsolicited) (Studi pada Proyek Unsolicited SPAM Kota Dumai), Tesis,
Universitas Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”)

Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU 3/2011”)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (“UU 17/2019”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (“PP 27/2014”)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (“PP 122/2015”)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP 54/2017”)

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam negeri 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (“Pemendagri 71/2016”);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (“PermenPUPR 19/2016”);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
("Permen PPN 4/2015")

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
("Permen PPN 2/2020");

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak
Ketiga ("Permen PPN 2/2020");

Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur ("Perka LKPP 19/2015")

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe ("Qanun
Lhokseumawe 4/2011");

Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota
Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerjasama
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Lhokseumawe ("Perdir
PDAM IBR 1/2021");

Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No. 85/PUU-XI/2013

PERJANJIAN DAN DOKUMEN LAINNYA

Dokumen *Request for Proposal* Proyek Kerjasama Investasi B2B Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Lhokseumawe 230 Lpd Tahap I

Perjanjian Omnibus Proyek Kerjasama Investasi Business to Business (B2B) Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Lhokseumawe 230 Liter per Detik tahap I

Perjanjian Kerjasama Sisi Hulu Proyek Kerjasama Investasi Business to Business (B2B) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Lhokseumawe 230 Liter per Detik tahap I

Perjanjian Kerjasama Sisi Hilir Proyek Kerjasama Investasi Business to Business (B2B) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Lhokseumawe 230 Liter per Detik tahap I

Financial Projection SPAM Lhokseumawe City Project

LAMAN

A.J, Ranga Pandu, 2023, *Wakil Presiden ingin seluruh PDAM bisa sediakan air minum sehat*, <https://www.antaranews.com/berita/3573759/wakil-presiden-ingin-seluruh-pdam-bisa-sediakan-air-minum-sehat>, diakses pada 04 Agustus 2023

Amalia, Rizky, 2022, Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9>, diakses pada 2 Desember 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring : Perlindungan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERLINDUNGAN>, diakses pada 11 Maret 2024

Budianto, Arif, *Peringkat Infrastruktur Indonesia di Posisi 50 Dunia*, Pemerintah Diminta Genjot Pembangunan, <https://www.idxchannel.com/economics/peringkat-infrastruktur-indonesia-di-posisi-50-dunia-pemerintah-diminta-genjot-pembangunan>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023

Easybiz, Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb>, di akses pada 07 Oktober 2023

Friana, Hendra, 2022, Rata-rata Cakupan Layanan PDAM di Daerah Baru 28,85%, Kementerian PUPR dorong Pemda beri dukungan ke PDAM,

<https://www.fortuneidn.com/news/friana/cakupan-layanan-pdam-di-berbagai-daerah-rata-rata-baru-28-85>, diakses pada 05 Oktober 2023

Heriani, Fitri Novia, Hal-hal yang Harus Dipahami Soal PT Perorangan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-hal-yang-harus-dipahami-soal-pt-perorangan-lt60d57e1c675a9/?page=all>, di akses pada 06 Oktober 2023

Kemenkeu, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/13-4/pjpk/mengapa-kpbu>, diakses pada 01 Oktober 2023

Kemekeu, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu>, diakses pada 01 Oktober 2023

Kemenkeu, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1098-1261/pjpk/dukungan-pemerintah/dukungan-kelayakan>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023

Kemenkeu, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/64-64/pjpk/dukungan-pemerintah/penjaminan-infrastruktur>, diakses pada 17 Oktober 2023

Kenton, Will, 2021, Whats is a condition precedent? Legal definition and examples, <https://www.investopedia.com/terms/c/condition-precedent.asp>, diakses pada 30 November 2023

Krishna, Yoseph, *PUPR Kembangkan KPBUs Bidang Air Minum*, <https://validnews.id/ekonomi/pupr-kembangkan-kpbu-bidang-air-minum>, diakses pada 19 April 2023

Martiasari, *Pemerintah Kebut Proyek Pembangunan Infrastruktur Air*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206180809-4-394339/pemerintah-kebut-proyek-pembangunan-infrastruktur-air>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Noor, M. Miftahul H., 2016, Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBUs-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>, diakses pada 17 Oktober 2023

Puteri, Cantika Adinda, Walau Pandemi Covid-19, Gas Terus Pemindahan Ibu Kota!,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210210100915-4-222354/walau-pandemi-covid-19-gas-terus-pemindahan-ibu-kota/2>, diakses pada 30 November 2023

Putri, A, Christy, E, Oktacianti, H, Penjaminan Pemerintah dalam Proyek KPBU: Lessons Learnt, Prinsip, dan Implementasi,
<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1110-1271/umum/kajian-opini-publik/penjaminan-pemerintah-dalam-proyek-kpbu-lessons-learnt-prinsip-dan-implementasi>, diakses pada 05 Desember 2023.

Segal, Troy, 2021, Greenfield vs. Brownfield Investments: What's the Difference?,
<https://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-green-field-and-brown-fieldinvestment.asp#:~:text=Greenfield%20and%20brownfield%20investment%20are,or%20leases%20an%20existing%20facility>, Diakses pada 01 Desember 2023

Simpul KPBU, *Perbedaan Solicited dan Unsolicited dalam KPBU*,
<http://simpulkpbu.pu.go.id/dist/publikasi/PERBEDAAN SOLICITED DAN UNSOLICITED DALAM KPBU.pdf>, diakses pada 16 Mei 2023

UN Documents, “*The Dublin Statement on Water and Sustainable Development*”, *International Conference on Water and the Environment*”, <http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm>, diakses pada 08 Mei 2023